

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS PENELITIAN

A. Penyajian Data

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap beberapa informan yang diantaranya, beberapa pengemis tuna netra di Jalan Nadjmi Adhani Kecamatan Banjarbaru Utara, pegawai Dinas Sosial Kota Banjarbaru, dan pegawai Pemko Banjarbaru bagian Kesra (Kesejahteraan Rakyat). Adapun wawancara yang dilakukan oleh peneliti sebagai berikut:

- a. Wawancara pertama, dilakukan pada tanggal 13 Desember 2021 yaitu dengan beberapa pengemis tuna netra di Jalan Nadjmi Adhani, guna mendapatkan keterangan awal.
- b. Wawancara kedua, dilakukan pada tanggal 5 Januari 2022 di Kantor Dinas Sosial Kota Banjarbaru yaitu guna mendapatkan keterangan awal mengenai beberapa pengemis tuna netra di Jalan Nadjmi Adhani Kecamatan Banjarbaru Utara.
- c. Wawancara ketiga, dilakukan pada tanggal 16 Juni 2022 dengan pengemis tuna netra yang bernama Muhammad Anwar.
- d. Wawancara keempat, dilakukan pada tanggal 18 Juni 2022 dengan pengemis tuna netra yang bernama Alan Wari.
- e. Wawancara kelima, dilakukan pada tanggal 18 Juni 2022 dengan pengemis tuna netra yang bernama Juhriah.

- f. Wawancara keenam, dilakukan pada tanggal 18 Juni 2022 dengan pengemis tuna netra yang bernama Rizal Hadi.
- g. Wawancara ketujuh, dilakukan pada tanggal 18 Juni 2022 dengan pengemis tuna netra yang bernama Hadi.
- h. Wawancara kedelapan, dilakukan pada tanggal 19 Juni 2022 dengan pengemis tuna netra yang bernama Hermansyah.
- i. Wawancara kesembilan, dilakukan pada tanggal 1 Juli 2022 dengan Ibu Hj.Maulidah, SKM, M.MKes selaku informan yang menjabat sebagai Penyuluh Sosial Ahli Muda Sub. Koordinator Seksi Rehabilitasi Lansia & Disabilitas. Bertempatkan di Kantor Dinas Sosial Kota Banjarbaru.
- j. Wawancara kesepuluh, dilakukan pada tanggal 3 Agustus 2022 yaitu dengan H. Agus Riza Syuhada yaitu pegawai Kesra Pemko Banjarbaru, guna mendapatkan data tambahan mengenai beberapa pengemis tuna netra di Jalan Nadjmi Adhani.

1. Uraian Hasil Wawancara Terhadap Pengemis

a. Pengemis 1

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti, terhadap pengemis atas nama Muhammad Anwar, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, dan beralamatkan di Jalan Panglima Batur (gang Rahmat) Kecamatan Banjarbaru Utara, beliau menjelaskan bahwa sebelum menjadi seorang tuna netra ia bekerja di Pertamina. Namun, dikarenakan sesuatu hal yang menyebabkan

dirinya buta total, sehingga tidak bisa lagi melihat cahaya sama sekali. Kemudian ia memutuskan untuk menjadi seorang pengemis, karena ada keluarga yang harus di nafkahi. Beliau mempunyai dua orang anak yang masih SD dan istri yang terbaring di rumah akibat stroke. Istrinya juga tidak bisa melihat sama seperti dirinya.

Alasan untuk menjadi pengemis pastinya dikarenakan oleh faktor kemiskinan dan tulang punggung keluarga, serta pemikiran “kalo tidak mengemis tidak dapat uang”. Biasanya untuk penghasilan yang didapat per-hari itu tidak tentu, paling banyak dapat seratus ribu rupiah, ada juga yang cuma dapat lima ribu rupiah, sepuluh ribu rupiah, dan bahkan ada yang tidak dapat sama sekali. Lokasi yang biasa dijadikan oleh Anwar mengemis, selain di Jalan Nadjmi Adhani yaitu di depan pom bensin Loktabat. Sebelumnya ia dan beberapa tuna netra lainnya pernah mengemis di sepanjang jalan depan PLN, namun dikarenakan pernah terjaring razia oleh Satpol PP, sehingga dirinya memilih mengemis di Jalan Nadjmi Adhani ini.

Setelah peneliti menanyakan lebih dalam mengenai organisasi PERTUNI dan YKTN seperti yang dijelaskan oleh pihak Dinas Sosial, ternyata Anwar ini termasuk dari bagian kedua organisasi tersebut. Berdasarkan pengakuannya ia mulai tergabung di PERTUNI sekitar tahun 1999 dan tidak mendapatkan bantuan rumah, dikarenakan ia memiliki KTP asal dari Barabai. Sementara syarat untuk mendapatkan rumah disabilitas yang berada di Jalan Trikora tersebut, harus asli KTP Banjarbaru. Beralih ke pembahasan lain mengenai YKTN ia juga terlibat

didalamnya, dan dari YKTN itu sendiri terkadang juga mendapatkan pembagian bantuan sembako.¹

b. Pengemis 2

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap pengemis atas nama Alan Wari, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, dan beralamatkan di Jalan Gotong Royong, Kecamatan Banjarbaru Utara, beliau menjelaskan bahwa selain menjadi seorang pengemis, dirinya juga bekerja sebagai tukang pijat, karena ia mendapatkan pelatihan pijat ini di sebuah Panti Fajar Harapan sebelumnya. Tak jarang ia melakukan pijat keliling, akan tetapi bisa juga pelanggan itu sendiri yang mendatangnya ke rumah. Namun, dikarenakan sepi pelanggan pijat, akhirnya ia memutuskan untuk mencari penghasilan tambahan lewat cara mengemis. Menurut pengakuannya, kalau hanya mengandalkan penghasilan dari pijat tidaklah cukup, karena harus membayar sewa rumah, membiayai anak sekolah, dan masih banyak lagi keperluan lainnya.

Biasanya Alan Wari mulai mengemis sekitar jam 07.00 wita sampai sore hari menjelang waktu magrib. Penghasilan yang didapat pun tak menentu, kadang dua puluh ribu rupiah, lima ribu rupiah, bahkan ada yang hanya dua ribu rupiah saja. Belum lagi jika ia harus mengeluarkan uang tersebut untuk membayar ojek yang digunakan, terkadang ia bisa jalan kaki atau bisa juga naik ojek, karena jarak dari rumah ke lokasi mengemis lumayan jauh sekitar 2 km lebih.

¹Muhammad Anwar, Pengemis 1, *Wawancara Pribadi*, Banjarbaru Utara, Kamis 16 Juni 2022.

Sebelumnya Alan Wari juga sama seperti pengemis tuna netra lainnya, pernah terjaring razia oleh Satpol PP, namun tidak juga membuatnya jera. Faktor kemiskinan menjadi salah satu pemicu dari Alan Wari untuk tetap mengemis. Sebenarnya ia ingin sekali mencari pekerjaan lain dan berhenti menjadi pengemis, akan tetapi ia merasa sudah tidak berdaya lagi. Menjadi pengemis sangatlah tak pernah terbayangkan sebelumnya, menurutnya terkadang malu duduk-duduk di jalan seperti ini dan juga terik matahari yang sangat menyengat, tapi apa boleh buat harus mencari nafkah seperti ini, ucapnya.

Saat ini harapan Alan Wari hanyalah solusi dari pemerintah agar lebih memperhatikan lagi bagaimana cara supaya ia dan teman-teman tuna netra yang lain tidak mengemis lagi seperti ini. Bahkan jika ada pelatihan kerja pun kami bersedia untuk mengikuti, asalkan disesuaikan dengan kemampuan dan keadaan kami yang terbatas ini. Meskipun sudah berusaha dengan dulu pernah berjualan kacang tanah, namun tidak laku dan sepi pembeli, ucapnya. Setelah peneliti menanyakan lebih dalam mengenai organisasi PERTUNI dan YKTN, ternyata Alan Wari ini termasuk dari bagian kedua organisasi tersebut. Berdasarkan pengakuannya ia mulai tergabung di PERTUNI sekitar satu tahun yang lalu, dan sampai sekarang ini ia menjadi bagian dari PERTUNI dan YKTN tersebut.²

c. Pengemis 3

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap pengemis atas nama Juhriyah, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, dan

²Alan Wari, Pengemis 2, *Wawancara Pribadi*, Banjarbaru Utara, Sabtu 18 Juni 2022.

beralamatkan di Jalan Gotong Royong, Kecamatan Banjarbaru Utara, beliau menjelaskan bahwa sudah setahun lebih menjadi seorang pengemis. Selain itu juga ia bekerja sampingan menjadi tukang pijat jika ada pasien yang ingin pijat, terkadang dijemput langsung dan bisa juga pasien itu sendiri yang datang ke rumahnya. Namun, dikarenakan kebutuhan yang belum tercukupi mau tidak mau ia harus mengemis untuk membiayai anaknya yang masih sekolah, seperti membeli buku-buku pelajaran, tas, sepatu dan perlengkapan sekolah lainnya. Kalau hanya mengandalkan uang hasil pijat tentunya tidak cukup, ditambah ia harus membayar sewa rumah perbulannya. Sementara suami telah lama pergi, terpaksa ia yang harus menjadi tulang punggung untuk ketiga anaknya.

Biasanya sekitar jam 07.00 wita Juhriah sudah mulai mengemis, ketika tengah hari ia pulang untuk beristirahat dan sholat dzuhur. Setelahnya jam 15.00 wita baru melanjutkan lagi mengemis sampai menjelang magrib. Penghasilan yang didapat tidak menentu, ada yang sepuluh ribu rupiah, ada yang dua puluh ribu rupiah, paling banyak biasanya empat puluh ribu rupiah dan terkadang juga uangnya dipakai untuk ongkos naik ojek. Setelah ditanya mengenai pernahkah dapat bantuan atau tidak, menurut pengakuannya dulu pernah mendapatkan bantuan blt namun sekarang sudah tidak lagi. Katanya juga pernah dijanjikan kalau vaksin dapat bantuan, tapi kenyataannya setelah ia dua kali vaksin ternyata tidak dapat juga, seolah-olah bagi Juhriah “habis covid habis juga bantuannya”.

Setelah peneliti menanyakan lebih dalam mengenai organisasi PERTUNI dan YKTN, ternyata Juhriah ini termasuk dari bagian kedua organisasi tersebut dan menurutnya boleh saja merangkap dua organisasi sekaligus. Menurut

pengakuannya ia juga mendapatkan rumah disabilitas dari PERTUNI tersebut. Namun, dikarenakan lokasi rumah disabilitas yang cukup jauh dengan usaha, sehingga menyebabkan ia lebih memilih menyewa di Jalan Gotong Royong ketimbang tinggal disana. Selain itu juga, disebabkan masing-masing dari mereka banyak yang memasang plang yang menandakan bahwa terima jasa pijat yang sama. Sehingga ia merasa banyak saingan dalam pekerjaan menjadi tukang pijat tersebut. Alasan lain yang dikemukakan Juhriah, fasilitas dari rumah disabilitas itu ada gratis air, gratis listrik dan ada yang tetap harus bayar sendiri. Kalau untuk kami ini termasuk listrik yang bayar sendiri.³

d. Pengemis 4

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap pengemis atas nama Rizal Hadi, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, dan beralamatkan di Jalan Gotong Royong, Kecamatan Banjarbaru Utara, beliau menjelaskan bahwa ia berasal dari Banjarmasin dan menyewa rumah di Jalan Gotong Royong, ia tidak mempunyai anak dan istri alias tidak memiliki tanggungan. Selain menjadi seorang pengemis dan tukang pijat, biasanya Rizal juga duduk di pinggir SPBU untuk mengamen atau karaoke. Kali ini Rizal berbeda dengan pengemis tuna netra sebelumnya, ia mengaku mengemis hanya hari tertentu saja yaitu sabtu dan minggu.

Penghasilan yang didapat pun tidak seberapa, hanya kurang lebih tiga puluh ribu rupiah saja dan kadang juga tak menentu. Menurut pengakuannya Rizal

³Juhriyah, Pengemis 3, *Wawancara Pribadi*, Banjarbaru Utara, Sabtu 18 Juni 2022.

juga pernah terjaring razia oleh Satpol PP, kemudian ia dibawa ke kantor dan setelahnya diantarkan pulang ke rumah. Seolah tak membuat efek jera, ia dan teman-teman tuna netranya yang lain pun tetap saja mengemis lantaran faktor ekonomi. Sebelumnya ia pernah mendapatkan bantuan blt sebanyak tiga ratus ribu rupiah, namun sampai sekarang tidak mendapatkan lagi bantuan.

Saat ini harapan Rizal Hadi hanyalah solusi dari pemerintah agar lebih memperhatikan nasib ia dan teman-teman tuna netra yang lain agar tidak mengemis lagi seperti ini, karena kebanyakan dari pengemis tuna netra ini memiliki keahlian dalam hal pijat. Seandainya kami ini lebih dijamin pastinya tidak akan mengemis, dan kalau perlu jasa pijat kami ini bisa sampai perusahaan, ungkapnya. Setelah peneliti menanyakan lebih dalam mengenai organisasi PERTUNI dan YKTN, ternyata Rizal ini termasuk dari bagian kedua organisasi tersebut. Menurut pengakuannya ia tergabung sekitar satu tahun yang lalu.⁴

e. Pengemis 5

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap pengemis atas nama Hadi, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, dan beralamatkan di Jalan Gotong Royong, Kecamatan Banjarbaru Utara, beliau menjelaskan bahwa sudah setahun ini ia mengemis di Jalan Nadjmi Adhani. Selain mengemis, Hadi juga biasanya mencari penghasilan tambahan lewat pijat dan mengamen atau karaoke di sekitaran pom bensin. Namun, selama adanya

⁴Rizal Hadi, Pengemis 4, *Wawancara Pribadi*, Banjarbaru Utara, Sabtu 18 Juni 2022.

pandemi virus corona yang menyebabkan usahanya sepi, sehingga Hadi mencari jalan pintas dengan cara mengemis, karena kebutuhan semakin banyak dan belum lagi harus membiayai ketiga anaknya. Biasanya ia mengemis mulai dari jam 07.00 pagi sampai dengan jam 10.00, baru setelahnya melanjutkan lagi sekitar jam 14.00 siang. Penghasilan yang didapat pun tak menentu, terkadang tiga puluh ribu rupiah dan paling banyak bisa sampai seratus ribu rupiah.

Setelah peneliti menanyakan lebih dalam mengenai organisasi PERTUNI dan YKTN, ternyata Hadi ini termasuk dari bagian kedua organisasi tersebut. Menurut pengakuannya ia sebagai anggota PERTUNI, sedangkan YKTN ia menjabat sebagai bendahara. Menurut pengakuannya Hadi tidak mendapatkan rumah disabilitas, ia sengaja tidak mengambil rumah tersebut dengan alasan susah untuk bermasyarakat disana, karena kami sudah menyatu dengan tuna netra yang lain di Jalan Gotong Royong. Kalau tinggal disana tidak bisa kemana-mana, sedangkan keperluan juga banyak. Setelah peneliti menanyakan apakah rumah disabilitas tadi diganti dengan uang, ternyata jawabannya tidak. Akan tetapi terkadang jika ada sumbangan-sumbangan dari orang, uangnya akan dibagi dengan anggota yang lain.⁵

f. Pengemis 6

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap pengemis atas nama Hermansyah, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, dan beralamatkan di Jalan Gotong Royong, Kecamatan Banjarbaru Utara, beliau

⁵Hadi, Pengemis 5, *Wawancara Pribadi*, Banjarbaru Utara, Sabtu 18 Juni 2022.

menjelaskan bahwa ia berjalan kaki kesini dan biasanya ia mulai mengemis dari pagi dan kadang pulang menjelang waktu magrib. Selain mengemis di Jalan Nadjmi Adhani, biasanya ia juga mengemis di jalanan. Alasan dirinya menjadi pengemis dikarenakan faktor ekonomi dan kebutuhan yang hidup, sehingga mengharuskannya mengemis. Bahkan penghasilan yang didapat juga tak tentu, kadang dapat tiga puluh ribu rupiah dan ada juga yang tidak dapat sama sekali. Setelah peneliti menanyakan mengenai organisasi PERTUNI dan YKTN yang ada di Banjarbaru, ternyata Hermansyah termasuk didalamnya.⁶

2. Uraian Hasil Wawancara Terhadap Dinas Sosial Kota Banjarbaru

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap pegawai Dinas Sosial Kota Banjarbaru, atas nama Hj. Maulidah, SKM, M.MKes. dengan NIP.19740405 199803 2 003, jabatan sebagai penyuluh sosial ahli muda sub. koordinator seksi rehabilitasi lanjut usia dan disabilitas, umur 48 tahun, agama Islam, dan nomor hp: 081256480884. Beliau menjelaskan beberapa hal terkait permasalahan penelitian yang akan diuraikan dibawah ini:

“Apakah Anda mengetahui Perda Kota Banjarbaru Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas?”

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas merupakan perda dari Kota Banjarbaru itu sendiri, yang terdiri dari beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yaitu Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Dinas Perumahan, Dinas Kesehatan, dan Satpol

⁶Hermansyah, Pengemis 6, *Wawancara Pribadi*, Banjarbaru Utara, Minggu 19 Juni 2022.

PP yang juga terlibat didalam penertibannya. Dari Perda ini sebenarnya ada turunan perwalinya yang menindak lanjuti terkait Perda itu sendiri, yaitu Perwali Nomor 42 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok dan fungsi serta tata kerja Dinas Sosial Kota Banjarbaru.

“Bagaimana strategi yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Banjarbaru terhadap perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas?”

Perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas itu banyak, jadi hal paling mendasar yang kami lakukan pertama kali adalah pendataan. Pendataan merupakan salah satu langkah awal Dinas Sosial Kota Banjarbaru untuk mengetahui jumlah penyandang disabilitas di Banjarbaru, dan dari pendataan itu sendiri kita mengetahui apa saja kebutuhan mereka. Sehingga pemberian bantuan yang kami salurkan itu berdasarkan apa saja yang mereka butuhkan tersebut, dan tidak semua penyandang disabilitas mendapatkan bantuan, karena perlu dipilah kembali antara yang mampu dengan yang tidaknya, sehingga tau mana yang benar-benar membutuhkan. Misalnya dia dikatakan mampu, namun tidak bisa membeli alat bantu dan semacamnya, maka bisa kita bantu juga dengan memberikan bantuan. Biasanya bantuan dari kami ada yang berbentuk sembako, makan minum harian, dan alat bantu seperti kursi roda, tongkat, kaki palsu, alat bantu pendengaran, yang pada intinya sesuai dengan kebutuhan mereka.

Ada juga bantuan modal usaha yang kami usulkan ke Kemensos melalui Ibu Yunis sebagai pendamping disabilitas. Nah, jadi dari pendataan tadi kita bisa mengetahui apa saja yang mereka butuhkan, karena pendataan merupakan hal

penting. Dari pendataan itu sendiri harus ada kelengkapan berkas seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan dokumen kependudukan lainnya yang diperlukan untuk memberikan bantuan. Jika beberapa diantara penyandang disabilitas tadi tidak memiliki KTP atau kartu keluarga, maka kami bantu buat juga untuk fasilitasi perekamannya, karena kami sudah bekerja sama dengan Dukcapil Kota Banjarbaru. Jadi mereka wajib memiliki dan harus ada kartu kependudukan, dikarenakan pemberian bantuan melalui bank, dan kami buat juga untuk rekening banknya.

Kemudian kalau yang anak-anak harus ada Kartu Identitas Anak (KIA) agar mudah kami arahkan ke pendidikannya atau inklusifnya. Kemudian ada juga yang berbentuk pelatihan. Ada pelatihan yang berbasis keluarga dan redensial. Kalau untuk yang redensial itu didalam panti dan untuk yang diluar panti itu bentuk bantuannya sejenis kemandirian, yaitu bisa bantuan modal usaha. Kemaren ada yang kita kirim ke Solo juga untuk pelatihan tata boga dan lain-lain.

Kalau untuk pelatihan yang redensialnya di Banjarbaru ini juga ada, yaitu di Panti Budi Luhur dan itu pelatihan keterampilan selama 6 bulan. Jadi, mereka mendapatkan pelatihan didalam panti tersebut. Pelatihan yang di dapat seperti mencukur, menjahit, pijat dan lain-lain. Selama 6 bulan mereka di dalam panti juga kami jamin kesehatannya, dengan cara dibuatkan fasilitas BPJS dan asuransi kesehatan. Sama halnya dengan penyandang disabilitas mental, seperti orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ. Apabila dia ingin di rujuk ke RS Sambang Lihum, maka dibuatkan juga KTP, KK, dan BPJS, karena selama dia dalam masa pengobatan harus dipastikan perlindungan kesehatannya. Jadi, untuk pemenuhan

dan perlindungan penyandang disabilitas yang dilakukan oleh Dinas Sosial, yaitu dengan cara-cara yang sudah disebutkan diatas tadi.

“Bagaimana pendapat Anda mengenai pengemis tuna netra di Jalan Nadjmi Adhani, jika dikaitkan dengan perda tersebut?”

Sebelum membahas mengenai pengemis tuna netra yang berada di Jalan Nadjmi Adhani tersebut, kami pernah mengadakan sebuah rapat koordinasi disini, yaitu bersama beberapa kepala seksi bidang, beserta SKPD yang terlibat dalam hal penanganan penyandang disabilitas itu sendiri. Sebenarnya yang kami bahas pada rapat itu mengenai masalah homecare, namun ada beberapa pertanyaan dari wartawan mengenai pengemis tuna netra yang ada di Jalan Nadjmi Adhani tersebut. Sehingga kami diperintahkan oleh Setda Kota Banjarbaru untuk turun langsung kesana, guna memberikan pengarahan bagi mereka yaitu dengan cara menawarkan beberapa alternatif pilihan supaya mereka tidak mengemis lagi di jalanan.

Padahal sebagian besar dari mereka itu sudah mendapatkan bantuan. Jika kami cek lagi identitas mereka itu ternyata sudah pernah mendapatkan bantuan dan semisalnya. Bahkan bantuan untuk modal usaha pun juga pernah diberi. Akan tetapi untuk diatur supaya mereka tidak mengemis lagi itu sangatlah sulit, karena itu tergantung dengan mental mereka sendiri. Seakan-akan mereka beranggapan bahwa ada cara yang lebih mudah yaitu meminta-minta daripada bekerja. Kalau berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2020 tentang perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, bahwa Perda ini terdiri dari beberapa Satuan Kerja

Perangkat Daerah atau SKPD kan, jadi harus terintegrasi kerjasama antara berbagai perangkat daerah, seperti Satpol PP, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial dan Pemko Banjarbaru itu sendiri khususnya yang paling tinggi. Jadi, kalau dihubungkan dengan Perda itu sendiri sebenarnya kami sudah menjalankan tugas pokok dan fungsi kami masing-masing berdasarkan SKPD tersebut.

“Menurut Anda apa saja faktor yang menyebabkan munculnya pengemis tuna netra di Jalan Nadjmi Adhani?”

Sebenarnya untuk permasalahan pengemis tuna netra yang berada di Jalan Nadjmi Adhani itu, mereka sudah mendapatkan bantuan dan segala macamnya dari pemerintah. Bahkan beberapa dari mereka ada yang terlibat sebagai anggota PERTUNI, yang sudah pasti itu di bina oleh Pemko Banjarbaru. Akan tetapi, sampai saat ini mereka masih saja mengemis, dan untuk melarang mereka supaya tidak mengemis lagi itu sangat susah. Kalau menurut kami, faktor yang menyebabkan adanya pengemis itu tergantung oleh mental mereka sendiri. Seolah-olah mental mereka itu sudah nyaman dengan menjadi pengemis, sebenarnya kan tidak boleh seperti itu kalau secara Agama Islam pun kita dilarang untuk meminta-minta. Padahal dari Pemko sendiri juga sudah memberikan pendidikan keagamaan terhadap mereka supaya tidak mengemis. Tapi memang mereka saja yang sulit untuk diatur. Dan yang mengemis itu ternyata bukan hanya dari warga Banjarbaru saja.

Apalagi jika dilihat pada hari Jum'at itu jumlah mereka pasti lebih banyak dari hari lain, biasanya ada yang sampai tiga puluh orang, tapi kalau di hari lain

mereka berkurang dan tidak sampai sebanyak itu. Hal itu terjadi dikarenakan kebanyakan orang memberikan sedekah atau berbagi di hari Jum'at, karena dalam Islam itu sendiri kalau berbagi dengan sesama itu sudah jelas baik, dan pastinya kebanyakan orang bersedekah itu di hari Jum'at. Biasanya para pengemis disana itu, kalau hari Jum'at dalam seharinya bisa dapat lima bungkus nasi atau bahkan lebih. Selain itu mereka juga mendapatkan uang dari beberapa orang yang bersedekah.

Selama masih ada beberapa orang dermawan memberi dan ada orang yang menerima, jadi semacam budaya. Seolah-olah para pengemis itu tahu kalau banyak orang yang bersedekah di hari Jum'at, dan jadi membuat mereka semakin nyaman dengan keadaan mengemis. Sehingga kebiasaan seperti itu sangat sulit untuk dihilangkan. Kita juga tidak bisa kan melarang orang lain untuk tidak memberi, misalkan ada orang yang ingin beramal dengan cara bersedekah kepada mereka terus kita larang, itu sangatlah tidak etis. Dari para pengemisnya juga sudah kita berikan pemahaman bahwa mengemis itu tidak baik dan tidak akan mendapatkan berkah, tapi masih saja mereka mengemis dan seolah-olah hanya masuk telinga kanan dan keluar telinga kiri saja bagi mereka.

Sebenarnya kalau mereka memiliki dasar agama yang kuat, pasti tidak akan memilih menjadi pengemis. Dalam Agama Islam itu sendiri kita dilarang, karena tangan diatas itu lebih baik daripada tangan dibawah, cuma memahami maksud itu sangatlah sulit ke mereka. Padahal mereka memiliki saja kemampuan yang lain, tapi mungkin karena sudah terbiasa dan akhirnya menjadi kebiasaan bagi mereka dan mungkin memang seperti itu fenomena di kota-kota besar.

Padahal kami sudah memberikan alternatif lain kepada mereka supaya tidak lagi mengemis, namun hasilnya nihil.

“Bagaimana upaya yang dilakukan Dinas Sosial Kota Banjarbaru dalam penanganan pengemis tuna netra di Jalan Nadjmi Adhani?”

Ada berbagai upaya yang kami lakukan untuk menangani permasalahan pengemis tuna netra di Jalan Nadjmi Adhani itu, salah satunya yaitu dengan cara menawarkan beberapa alternatif pilihan kepada mereka supaya tidak lagi mengemis. Beberapa alternatif pilihan itu diantaranya, kami ingin mendata siapa saja dari mereka yang memiliki keahlian dalam hal menyanyi, supaya diarahkan ke warung-warung atau cafe. Namun, cara seperti ini perlu adanya persetujuan terlebih dulu dari pemilik warung atau cafenya, apakah dia tidak merasa keberatan jika harus menerima tuna netra ini untuk bekerja disana.

Selain itu, kami juga memberikan bantuan modal usaha supaya mereka berjualan saja dirumah. Misalnya seperti jualan sembako, pulsa, dan lain-lain sudah juga kami berikan pilihan seperti itu. Akan tetapi yang namanya berdagang itu tidak selalu dapat untung dalam seharinya dan kadang ada yang tidak laku juga. Disinilah yang membedakannya, kesabaran itu tidak semua orang memiliki. Jadi, seolah-olah mereka ingin yang instant saja yaitu dengan cara mengemis. Apalagi kalau mengemis di hari Jum'at sudah pasti mereka banyak dapat untung, ketimbang memilih berjualan.

Selain itu, beberapa dari mereka memiliki keahlian pijat. Sehingga kami memberikan salah satu alat bantu yang memudahkan pemasaran bagi mereka,

yaitu dengan cara memberi bantuan berupa hp android khusus tuna netra. Diharapkan dengan adanya bantuan hp tersebut, memudahkan mereka dalam mencari rezeki dengan cara pijat. Namun nyatanya usaha ini juga belum membuahkan hasil, karena masih saja beberapa dari mereka ditemukan duduk di pinggiran Jalan Nadjmi Adhani hanya untuk mengemis belas kasihan orang.

“Berapa bulan sekali melakukan razia terhadap pengemis ?”

Biasanya kami sering melakukan razia itu saat menjelang bulan ramadhan, karena jumlah mereka saat-saat mendekati bulan puasa itu sangat banyak sekali. Kalau secara rutin berapa bulan sekalinya itu tidak menentu. Biasanya itu tergantung oleh situasi dan kondisi, jika dirasa kemunculan mereka itu dinilai sangat mengganggu maka dilakukanlah razia. Selain itu juga berdasarkan dari banyaknya laporan orang-orang sekitar mengenai keberadaan pengemis tuna netra yang dinilai meresahkan tersebut.

“Adakah pihak-pihak lain yang juga terkait dalam penertiban pengemis tersebut?”

Mengenai hal penertiban pengemis atau razia, pihak-pihak lain yang juga turut andil ikut didalamnya yaitu Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Satpol PP, dan Dinas Perhubungan, serta pihak-pihak lain yang memungkinkan diperlukan juga.

“Apa kendala yang dialami saat melakukan razia terhadap pengemis?”

Razia pengemis yang biasa kami lakukan itu ada dua macam. Pertama razia resmi, yaitu razia yang memerlukan surat izin serta dengan bantuan berbagai

pihak yang terlibat didalamnya. Kedua sidak, yaitu razia dengan cara langsung turun ke tempat kejadian perkara atau tanpa adanya pemberitahuan. Biasanya dengan cara yang kedua ini atau sidak, lebih banyak pengemis yang terjaring razia. Sedangkan kalau secara resmi itu, beritanya banyak yang bocor kepada mereka.

Sehingga dari pengalaman-pengalaman sebelumnya saat kami ingin melakukan razia itu, ternyata pengemis-pengemis itu tidak ada, paling hanya ada satu atau dua orang saja yang terlihat, sisanya entah kemana. Mengenai razia secara resmi ini pun kami bingung siapa yang telah membocorkan bahwa akan diadakan razia. Menurut dugaan kami, dengan adanya bantuan hp android kepada para pengemis tuna netra tersebut. Ternyata disalahgunakan oleh mereka, dan seakan-akan memudahkan mereka juga untuk saling berkomunikasi antar satu sama lain, yaitu dengan menginformasikan bahwa akan diadakannya razia.

“Apakah ada pembinaan terhadap pengemis?”

Setelah beberapa pengemis tuna netra tadi terjaring razia, lalu kami bawa ke kantor Dinas Sosial untuk di beri arahan. Biasanya kami secara baik-baik juga saat merazia mereka, tidak mungkin juga kami melakukan kekerasan layaknya razia PSK, karena mereka itu tidak melakukan kejahatan dan hanya mengganggu ketertiban saja. Jadi setelah di razia itu, kami data lalu kami pulangkan kembali. Sebenarnya pembinaan terhadap pengemis tuna netra itu sudah ada, apalagi kalau mereka termasuk bagian dari anggota PERTUNI.

Biasanya pembinaan terhadap mereka yaitu dengan cara diadakannya pengajian secara rutin. Dan disana juga ada ceramah keagamaan yang tidak membolehkan untuk mengemis. Pengajian rutin itu sendiri biasanya diselenggarakan hari Senin atau Rabu. Selain PERTUNI yang mengadakan pembinaan melalui pengajian rutin, ternyata dari organisasi YKTN itu sendiri mereka juga mengadakan pengajian secara rutin layaknya PERTUNI. Jadi, menurut kami pembinaan terhadap pengemis tuna netra itu sudah dilaksanakan sebagai mana mestinya.

“Apakah pengemis tuna netra tersebut pernah diberi program pelatihan?”

Seperti yang dijelaskan sebelumnya, bahwa para penyandang disabilitas yang sudah kami lakukan pendataan itu di data guna mendapatkan bantuan dan semacamnya. Selain mendapatkan bantuan seperti sembako, modal usaha, ada juga pelatihan keterampilan di Panti Budi Luhur selama 6 bulan. Rata-rata para penyandang disabilitas sensorik atau yang biasa dikenal tuna netra ini, mereka memiliki keahlian di bidang pijat. Jadi, kalau untuk program pelatihan khusus mereka itu juga sudah diberikan.

Sehingga kebanyakan pengemis tuna netra di Jalan Nadjmi Adhani tersebut punya saja keahlian di bidang pijat, hanya saja mereka mencari penghasilan tambahan lewat cara mengemis. Meskipun mereka sendiri juga berprofesi sebagai tukang pijat, karena itu tadi mental mereka sendiri yang mendorong dirinya untuk menjadi pengemis yaitu kurangnya kesabaran yang mereka miliki dan dasar agama yang juga tidak kuat.

“Bagaimana pendapat Anda mengenai dua organisasi PERTUNI dan YKTN tersebut?”

Pada dasarnya di Banjarbaru ini ada memiliki dua organisasi tuna netra, yaitu Persatuan Tuna Netra Indonesia atau yang disingkat PERTUNI dan Yayasan Kesejahteraan Tuna Netra atau yang disingkat YKTN. PERTUNI itu sendiri merupakan organisasi resmi yang dibina langsung oleh Pemko Banjarbaru, dan mereka yang terlibat disana pastinya sudah mendapatkan bantuan dan sebagainya. Mengenai beberapa pengemis tuna netra di Jalan Nadjmi Adhani tersebut, ternyata beberapa dari mereka ada yang termasuk dari anggota PERTUNI dan ada juga yang termasuk keanggotaan YKTN. Bahkan ada juga yang merangkap keduanya. Sebenarnya tidak masalah jika mereka yang anggota PERTUNI itu masuk juga keanggotaan YKTN, karena YKTN itu organisasi yang resmi juga cuma bentuknya saja berupa yayasan.

Dari PERTUNI itu sendiri semacam diakui oleh pemerintah dan organisasi tuna netra seluruh Indonesia itu ya PERTUNI itu tadi namanya, kalau YKTN bentuknya yayasan, bukan organisasi yang diakui pemerintah. Akan tetapi, kami sebagai Dinas Sosial ini tidak pernah memperhitungkan atau membeda-bedakan mereka yang dari PERTUNI atau YKTN. Intinya semua penyandang disabilitas, selagi dia belum pernah mendapatkan bantuan dan mampu menunjukkan KTP, berarti mereka sudah terdata. Sementara mereka yang belum pernah dapat bantuan sama sekali itu berarti belum terdata, kalau KTP asli Banjarbaru itu sudah pasti pernah dapat bantuan. Akan tetapi jika KTP mereka berasal dari luar itu tidak dapat, karena hanya khusus warga Banjarbaru, kecuali dia mau pindah

kependudukan menjadi KTP Banjarbaru. Jadi harus mengurus perpindahannya dulu melalui Dukcapil, dan dalam proses pembuatan KTP yang baru itu juga kami sudah bekerja sama dengan Dukcapil Banjarbaru, sehingga mempermudah mereka nantinya saat ingin pendataan bantuan.

“Apakah semua anggota PERTUNI kebutuhannya sudah tercukupi?”

Kalau secara bantuan yang diberikan kepada PERTUNI itu banyak, ada bantuan modal usaha, pelatihan keterampilan, BPJS kesehatan, bahkan mereka juga mendapatkan uang sebesar dua ratus ribu rupiah perbulannya, asalnya dia mampu menunjukkan kartu keanggotaan PERTUNI. Selain itu juga ada bantuan rumah disabilitas yang diberikan oleh Pemko Banjarbaru itu sendiri. Namun, kebanyakan dari mereka para tuna netra itu tidak menetap disana. Hal ini dikarenakan jumlah rumah disabilitas yang terbatas, yaitu hanya sebanyak 20 buah sebelumnya. Akan tetapi untuk sekarang jumlahnya sudah bertambah menjadi 15 buah yang baru di bangun oleh Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), dan ada juga yang berasal dari luar Banjarbaru yaitu ada penyandang disabilitas yang dari Hulu Sungai Utara.

Selain itu, alasan beberapa tuna netra tersebut tidak mengambil rumah disabilitas adalah dikarenakan rata-rata dari mereka memiliki keahlian pijat, dan profesi menjadi tukang pijat disana itu sudah terlalu banyak. Sehingga mereka lebih memilih tinggal atau menetap di lain. Kebanyakan dari mereka juga sudah mendapatkan bantuan hp android, jadi mereka juga sudah mempunyai langganan pijat dan siapa saja yang ingin pijat bisa langsung menghubungi mereka,

kemudian dijemput. Sedangkan jika mereka tadi tinggal di perumahan disabilitas, pasiennya merasa keberatan dan jaraknya juga yang lumayan jauh yaitu di Trikora. Berbagai alasan itulah yang menyebabkan para tuna netra itu tidak ingin tinggal menetap di perumahan disabilitas, dan alasan lain yaitu mereka mempunyai markas khusus YKTN yaitu di Jalan Gotong Royong. Selain bantuan berupa hp android khusus tuna netra, ada juga yang diberi bantuan berupa jam tangan, speaker, alat bantu dengar, tongkat, dan lain-lain. Hal itu diharapkan agar kebutuhan mereka itu terpenuhi. Dan harapan kami dengan adanya bantuan tersebut bisa digunakan dengan baik sebagaimana mestinya.

“Apa saja kelebihan dan kekurangan dari kedua organisasi tersebut?”

Mengenai kelebihan dan kekurangannya kami kurang mengetahui. Mungkin kalau untuk kelebihannya PERTUNI itu kan resmi dan langsung di bina oleh Pemko Banjarbaru. Sedangkan YKTN itu resmi juga, akan tetapi bentuknya berupa yayasan dan dianggap sebagai lembaga pribadi.⁷

3. Uraian Hasil Wawancara Terhadap Kesra Pemko Banjarbaru

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap pegawai Kesra Pemko Banjarbaru atas nama H. Agus Riza Syuhada, S.Kom. dengan NIP.19760818 200604 1009, jabatan sebagai Analisis Kebijakan Ahli Muda, umur 46 tahun, agama Islam, dan nomor hp: 08125006222. Beliau menjelaskan bahwa pada saat itu Sekretariat Daerah atau Sekda mempunyai niat ingin menolong kaum disabilitas supaya mereka tidak meminta-minta lagi di jalanan,

⁷Hj. Maulidah, penyuluh sosial ahli muda sub. koordinator seksi rehabilitasi lanjut usia dan disabilitas, *Wawancara Pribadi*, Kantor Dinas Sosial Kota Banjarbaru, Jum'at 1 Juli 2022.

yaitu dengan cara membuat suatu kompleks perumahan khusus kaum disabilitas. Sehingga pada saat itu para pegawai negeri sipil yang berada di Pemko Banjarbaru tersebut diminta sumbangan suka rela agar bisa mendukung terlaksananya pembangunan ini.

Pada saat itu, Sekda juga melakukan koordinasi dengan wali kota Banjarbaru, yaitu Bapak Alm. Nadzmi Adhani untuk bisa membantu penggunaan lahan kosong yang akan dijadikan rumah disabilitas tersebut. Alhamdulillah pada tahun 2018 sudah mulai penggarapan dan kerjasamanya pun tidak hanya dari Pemko saja, melainkan PUPR Provinsi, dan pihak-pihak terkait yang juga turut andil didalamnya, seperti para donatur misalnya.

Para disabilitas sensorik seperti tuna netra memiliki keahlian di bidang pijat, sehingga dibuatkan kompleks perumahan disabilitas itu agar memudahkan mereka nantinya saat melayani pasien pijat. Akan tetapi, niat baik itu tidak semuanya diterima baik oleh para tuna netra tersebut, dalam artian ada yang ingin bergabung dan ada yang tidak. Pada dasarnya ada dua organisasi tuna netra di Banjarbaru ini, yaitu Pertuni dan YKTN. Kedua organisasi tersebut berbeda, kalau Pertuni itu secara hukum diakui dan ada pusatnya tersendiri. Sedangkan YKTN secara hukum diakui juga, namun tidak ada pusat layaknya organisasi Pertuni.

Mereka yang tergabung di rumah disabilitas tersebut adalah yang berasal dari keanggotaan Pertuni, dan bagi mereka yang mendapatkan fasilitas rumah secara gratis ini harus memenuhi syarat yaitu dengan catatan tidak boleh lagi mengemis. Sehingga beberapa dari mereka tinggal disana dan mematuhi aturan,

ada juga yang memilih untuk tidak mengambil rumah itu, karena anggota Pertuni terbagi menjadi 2 macam yaitu anggota Pertuni yang memilih menetap di kompleks perumahan disabilitas dan anggota Pertuni yang menetap diluar. Akan tetapi, mereka yang memilih menetap diluar tersebut, apabila ada pengajian yang diadakan oleh Pertuni itu sendiri, mereka tetap ikut menghadirinya.

Pengajian rutin dari Pertuni merupakan program dari bagian Kesra Pemko Banjarbaru, saya beserta rekan yaitu Ustadz Noval yang mengisi keagamaan tersebut. Biasanya pengajian rutin diadakan pada hari Senin, Selasa dan Rabu. Hari Senin dan Rabu diisi dengan keagamaan tentang kitab fiqih, sedangkan hari Selasanya khusus untuk pengajian. Jadi, kalau dari bagian Kesra Pemko Banjarbaru ini lebih ke moralitas atau keagamaannya. Sedangkan secara fisiknya, untuk Dinas Sosial yang lebih tepatnya.

Bagi anggota Pertuni yang memilih tinggal di kompleks tidak boleh lagi mengemis, dan kalau mereka ketahuan mengemis lagi, maka akan dikenakan sanksi. Sanksi yang diberikan tersebut yaitu berupa peringatan terlebih dulu, sanksi secara tertulis, dan sanksi itu yang jelas tidak serta merta paling tidak ada 3x peringatan. Jika mereka melanggar aturan yang ada dengan masih menjadi seorang pengemis, maka mau tidak mau harus kami keluarkan dari kompleks perumahan disabilitas tersebut, bukan dari keanggotaan Pertuni.

Pada tahap awal dari rumah disabilitas ini, mereka mendapatkan fasilitas secara gratis dan jumlah rumahnya pun hanya sedikit. Seiring berjalannya waktu, di garap lagi pembangunan rumah disabilitas tersebut. Namun dengan catatan

bahwa rumah yang dibangun itu masih kepemilikan dari Kementrian PUPR, alias belum menjadi milik Pemko Banjarbaru. Hal tersebut dikarenakan belum adanya pengambil alihan kepemilikan. Sehingga konsekuensi atau akibat yang ditimbulkan yaitu listriknya menjadi bayar sendiri. Listrik yang digunakan pun berbentuk token pulsa. Dari Pemko Banjarbaru sendiri tidak bisa membayarkan atau menganggarkan listrik tersebut ke APBD kami, karena itu pada dasarnya memang bukan kepemilikan Pemko. Sedangkan untuk rumah disabilitas yang tahap awal masih gratis, karena itu sudah menjadi bagian dari Pemko.

Jadi mungkin itulah yang menjadi sedikit kendala bagi mereka sehingga lebih memilih tinggal diluar komplek perumahan disabilitas. Terkait yang tidak mengambil rumah disabilitas itu, mereka beranggapan bahwa seperti layaknya seekor burung yang berada didalam sangkar dan tidak bisa kemana-mana. Sehingga menjadi alasan bagi mereka untuk tidak tinggal di komplek tersebut. Selain itu juga mereka berpendapat kalau penghasilan yang didapat dari mengemis lebih besar dibandingkan dengan penghasilan yang ada. Padahal tujuan dari kami membuatkan rumah disabilitas itu supaya mereka berhenti mengemis, dan bekerja menjadi tukang pijat disana.

Akan tetapi, dengan adanya penyebaran virus covid-19 pada tahun 2020 lalu menjadi puncak dari kesulitan mereka mencari pasien. Hal ini dikarenakan adanya jaga jarak dan rasa takut terhadap penyebaran virus covid-19, meskipun dari para tuna netra itu sendiri sudah menjaga kebersihan. Sehingga memberikan dampak yang besar bagi pendapatan mereka. Namun, alhamdulillah ada dapat

bantuan dari para donatur dan itu adalah sumbangsih mereka. Ada yang membantu dengan memberi makan minum harian, sembako, dan uang tunai.

Untuk organisasi YKTN itu pun kami perhatikan juga, misalnya ada para donatur yang mereka lebih mudah memberikan bantuan ini melalui Pertuni, karena YKTN ini jarang dikenali publik. Jadi, para YKTN itu mengambil sumbangannya ke Pertuni, karena pada dasarnya sebagian dari mereka anggota YKTN itu juga termasuk anggota Pertuni. Mengenai mereka yang merangkap menjadi anggota Pertuni dan YKTN tersebut, secara hukum kita tidak bisa melarang mereka, karena itu merupakan hak mereka untuk mengikuti organisasi. Namun, disatu sisi kami ingin menegaskan bahwa harus satu keanggotaan saja, tetapi nanti kami ditentang orang. Mengenai pendapatan mereka yang dulunya menurun karena covid-19, alhamdulillah sekarang sudah mulai membaik semenjak puncak covid-19 berlalu.⁸

4. Matrik Hasil Wawancara

No.	Nama Informan	Keterangan
1.	Muhammad Anwar (50) tahun, agama Islam, pendidikan SD.	<ul style="list-style-type: none"> a. Alasan menjadi pengemis dikarenakan oleh faktor kemiskinan dan pemikiran “kalau tidak mengemis, tidak dapat uang”. Selain itu ia juga menjadi tulang punggung keluarga, serta memiliki tanggungan istri dan 2 orang anak yang masih duduk dibangku SD. b. Penghasilan perharinya tak menentu, paling banyak seratus ribu rupiah dan paling sedikit tidak dapat sama sekali. c. Tergabung menjadi anggota Pertuni dan YKTN.

⁸H. Agus Riza Syuhada, Analisis Kebijakan Ahli Muda, *Wawancara Pribadi*, Pemko Banjarbaru, Rabu 3 Agustus 2022.

2.	Alan Wari (43) tahun, agama Islam, pendidikan SD.	<ul style="list-style-type: none"> a. Alasan menjadi pengemis yaitu untuk mendapatkan penghasilan tambahan, karena jika mengandalkan penghasilan dari pijat saja tidak cukup. Selain itu harus bayar sewa rumah, membiayai anak sekolah, dan keperluan lainnya. b. Penghasilan perharinya tak menentu, kadang dua puluh ribu rupiah dan paling sedikit dua ribu rupiah. c. Tergabung menjadi anggota Pertuni dan YKTN.
3.	Juhriyah (46) tahun, agama Islam, pendidikan SD.	<ul style="list-style-type: none"> a. Alasan menjadi pengemis yaitu untuk mencari penghasilan tambahan, menurutnya kalau hanya mengandalkan penghasilan dari pijat saja tidak cukup. Selain itu harus bayar sewa rumah, membiayai anak sekolah, dan keperluan lainnya. Sementara itu suaminya telah lama pergi. b. Penghasilan perharinya tak menentu, dan paling banyak empat puluh ribu rupiah. c. Tergabung menjadi anggota Pertuni dan YKTN.
4.	Rizal Hadi (50) tahun, agama Islam, pendidikan SD.	<ul style="list-style-type: none"> a. Alasan menjadi pengemis yaitu untuk mencari penghasilan tambahan. Selain mengemis, ia juga sebagai tukang pijat dan pengamen di SPBU. b. Penghasilan perharinya kurang lebih tiga puluh ribu rupiah. c. Tergabung menjadi anggota Pertuni dan YKTN.
5.	Hadi (46) tahun, agama Islam, pendidikan SD.	<ul style="list-style-type: none"> a. Alasan menjadi pengemis yaitu lantaran faktor ekonomi dan untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Selain mengemis, ia juga sebagai tukang pijat dan pengamen di SPBU. b. Penghasilan perharinya tak menentu, dan paling banyak bisa dapat seratus ribu rupiah. c. Tergabung menjadi anggota Pertuni dan YKTN.
6.	Hermansyah (50) tahun, agama Islam, pendidikan SD.	<ul style="list-style-type: none"> a. Alasan menjadi pengemis yaitu dikarenakan faktor ekonomi dan kebutuhan yang hidup. b. Penghasilan perharinya tak menentu, paling banyak tiga puluh ribu rupiah dan paling sedikit tidak dapat sama sekali. c. Tergabung menjadi anggota Pertuni dan YKTN.

7.	Hj. Maulidah, SKM, M.MKes. (Penyuluh Sosial Ahli Muda Sub.Koordinator Seksi Rehabilitasi Lanjut Usia & Disabilitas)	<ul style="list-style-type: none"> a. Perda Nomor 1 Tahun 2020 tentang perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas merupakan perda dari Kota Banjarbaru, yang terdiri dari beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). b. Strategi pelaksanaan Perda Nomor 1 Tahun 2020 yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Banjarbaru, yaitu langkah pertama adalah pendataan jumlah penyandang disabilitas guna memudahkan penyaluran bantuan. Pada tahap pendataan, kami juga sudah bekerja sama dengan Dukcapil. Begitu pula untuk rekening banknya juga kami bantu buat, karena penyaluran bantuan ada yang melalui bank. c. Ada juga pelatihan, pelatihan terbagi 2 yaitu berbasis keluarga dan redensial. Pelatihan keluarga atau diluar panti, bantuannya sejenis kemandirian, seperti bantuan modal usaha. Sedangkan pelatihan redensial itu didalam panti, seperti Panti Budi Luhur, dan pelatihan tersebut selama enam bulan. Di dalam panti itu pun juga diperhatikan jaminan kesehatannya. Jadi, kalau dihubungkan dengan Perda itu sendiri sebenarnya kami sudah menjalankan tugas pokok dan fungsi kami masing-masing berdasarkan SKPD tersebut. d. Faktor munculnya pengemis tuna netra di Jalan Nadjmi adhani dikarenakan mental pengemis sendiri. Selain itu, masyarakat Banjarbaru yang terkenal dermawan. Apalagi jika dihari Jum'at, jumlah pengemis semakin bertambah. e. Upaya yang dilakukan untuk menangani pengemis yaitu dengan cara menawarkan beberapa alternatif pilihan. Namun, cara tersebut kurang maksimal. f. Razia pengemis ada dua macam. Pertama razia resmi, yaitu razia yang memerlukan surat izin serta dengan bantuan berbagai pihak yang terlibat didalamnya. Kedua sidak, yaitu razia dengan cara langsung turun ke tempat kejadian perkara atau tanpa adanya pemberitahuan. Namun, untuk pelaksanaan razia resmi informasinya selalu saja bocor, dan ketika di razia para pengemis itu tidak ada. g. Pada dasarnya di Banjarbaru memiliki dua organisasi tuna netra, PERTUNI & YKTN.
----	--	---

		<p>PERTUNI merupakan organisasi resmi yang dibina langsung oleh Pemko Banjarbaru, sedangkan YKTN hanya berupa yayasan.</p> <p>h. Bantuan yang didapatkan dari Pertuni seperti bantuan modal usaha, pelatihan keterampilan, BPJS kesehatan, uang saku perbulan, bahkan rumah disabilitas. Namun, kebanyakan dari para tuna netra itu tidak menetap disana. Hal ini dikarenakan jumlah rumah disabilitas yang terbatas, selain itu rata-rata tuna netra disana banyak yang menjadi tukang pijat. Sehingga pendapatan yang didapat pun juga terbilang sedikit.</p>
8.	H. Agus Riza Syuhada, S.Kom. (Analisis Kebijakan Ahli Muda)	<p>a. Sekda mempunyai niat ingin menolong kaum disabilitas supaya mereka tidak meminta-minta lagi di jalanan, yaitu membuat komplek perumahan khusus kaum disabilitas.</p> <p>b. Pada dasarnya ada dua organisasi tuna netra di Banjarbaru, yaitu Pertuni dan YKTN. Pertuni secara hukum diakui dan ada pusatnya tersendiri, sedangkan YKTN secara hukum diakui juga, namun tidak memiliki pusat layaknya Pertuni.</p> <p>c. Rumah disabilitas khusus keanggotaan Pertuni, asalkan dengan catatan tidak boleh lagi mengemis.</p> <p>d. Anggota Pertuni terbagi menjadi 2 macam yaitu Pertuni yang tinggal di komplek perumahan, dan Pertuni yang tinggal diluar komplek.</p> <p>e. Bagi Pertuni yang tinggal di komplek tidak boleh lagi mengemis, apabila melanggar maka akan dikenakan sanksi berupa dikeluarkan dari komplek disabilitas, bukan keanggotaan Pertuni.</p> <p>f. Tahap awal di rumah disabilitas, mereka mendapatkan fasilitas gratis dan jumlahnya terbatas. Seiring berjalannya waktu digarap lagi, namun dengan catatan masih kepemilikan Kementrian PUPR, alias belum kepemilikan Pemko. Konsekuensinya listrik jadi bayar sendiri, sedangkan untuk rumah disabilitas yang tahap awal masih gratis, karena itu sudah menjadi bagian dari Pemko. Sehingga menjadi alasan mereka memilih tinggal diluar komplek.</p> <p>g. Mengenai merangkap menjadi anggota Pertuni dan YKTN, secara hukum tidak bisa melarang. Hal itu merupakan hak mereka untuk mengikuti organisasi.</p>

B. Analisis Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dan telah memperoleh data, maka analisis yang digunakan sebagai pokok pembahasan yaitu untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Peran Dinas Sosial Kota Banjarbaru Terhadap Pelaksanaan Perda Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

Perlindungan dan pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas merupakan tanggung jawab pemerintah daerah, namun bukan berarti pihak lain yang terkait tidak turut andil dalam pelaksanaannya. Salah satunya yaitu Dinas Sosial yang memiliki peranan penting dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang sosial, serta menjadi wadah yang menaungi para penyandang disabilitas untuk mencapai kesejahteraannya secara sosial.

Dinas sosial merupakan satuan kerja perangkat daerah yang melaksanakan kegiatan pada bidang kesejahteraan masyarakat dan sosial. Adapun tugas dari Dinas Sosial Kota Banjarbaru yaitu untuk membantu walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang sosial, yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kota Banjarbaru. Maka dari itu, sangat diharapkan bisa berperan terhadap pelaksanaannya. Menurut Soerjono Soekanto, peran merupakan aspek dinamis dari kedudukan atau status, jika seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya dengan sesuai, maka ia

melakukan sebuah peran. Kedudukan atau status yang dimiliki tersebut, sangat berpengaruh terhadap peran yang dimainkannya.

Peran juga terdiri dari tiga macam, diantaranya peran aktif, peran partisipatif, dan peran pasif. Sebagaimana Dinas Sosial Kota Banjarbaru ini termasuk ke dalam peran aktif, yaitu peran yang diberikan oleh anggota kelompok karena kedudukannya tersebut sebagai kegiatan kelompok, seperti pengurus, pejabat, dan sebagainya. Hal tersebut menunjukkan bahwa Dinas Sosial merupakan perangkat daerah sebagai unsur pelaksana penyelenggaraan pemerintahan daerah dan dipimpin oleh Kepala Dinas yang bertanggung jawab kepada Walikota.

Sebagaimana yang akan menjadi analisis dari peneliti adalah peran terhadap pelaksanaan peraturan daerah atau perda. Perda yang dimaksud tersebut merupakan Perda Nomor 1 Tahun 2020 tentang perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Sebenarnya perda ini merupakan hak inisiatif dari DPRD dalam pembentukannya. Sehingga terdiri dari beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD yang terdiri dari Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Dinas Perumahan, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, Satpol PP serta pihak-pihak lain yang turut serta dalam perlindungan dan pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas. Sehingga dalam pelaksanaannya diperlukan kerja sama dengan yang lain, dan peran dari Dinas Sosial Kota Banjarbaru itu sendiri terhadap pelaksanaan Perda Nomor 1 Tahun 2020 yaitu dengan cara sebagai berikut:

a. Pendataan

Pendataan merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Banjarbaru untuk mengetahui jumlah penyandang disabilitas yang ada di Kota Banjarbaru. Setelah melalui sejumlah rangkaian pendataan, barulah diketahui apa-apa saja yang dibutuhkan oleh para penyandang disabilitas tersebut. Sehingga memudahkan dalam pemberian atau penyaluran bantuan nantinya.

Pada saat pendataan ini, para penyandang disabilitas harus memenuhi persyaratan yaitu memiliki dokumen kependudukan, seperti KTP dan kartu keluarga. Bagi mereka yang tidak mempunyai KTP atau kartu keluarga, maka akan dibantu untuk proses perekamannya yaitu pada Dukcapil Kota Banjarbaru.

Setelah melalui pendataan dan diketahui apa saja kebutuhan yang diperlukan bagi para penyandang disabilitas, selanjutnya yaitu verifikasi data. Verifikasi data adalah pemeriksaan kembali suatu data, guna memastikan keakuratan dan kebenaran dari suatu informasi yang telah dilaporkan. Setelah verifikasi selesai, langkah selanjutnya yaitu validasi data. Validasi data adalah pemeriksaan guna memastikan bahwa data tersebut sesuai kriteria, dengan tujuan bahwa data yang akan dimasukkan telah diketahui dan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya. Setelah itu, lanjut ke tahap proses kelengkapan berkas yang lainnya.

Alur kegiatan pendampingan penyandang disabilitas untuk mendapatkan alat bantu oleh pendamping disabilitas, yaitu diantaranya:

1. Koordinasi sekaligus verifikasi data penyandang disabilitas kekelurahan setempat .
2. Validasi data penyandang disabilitas kerumah disabilitas.
3. Membantu proses pelengkapan berkas yang diajukan ke Dinas Sosial



b. Pemberian Bantuan

Pemberian bantuan terhadap para penyandang disabilitas, biasanya bantuan tersebut ada yang berbentuk sembako, makan minum harian, dan alat bantu seperti kursi roda, tongkat, kaki palsu, alat bantu pendengaran, modal usaha, dan lain-lain sesuai dengan kebutuhan mereka. Selain itu, ada juga bantuan khusus berupa rumah disabilitas yang dibangun oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dengan menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau yang disingkat APBN.

c. Program Pelatihan

Program Pelatihan terbagi menjadi 2 macam, yaitu pelatihan dengan berbasis keluarga dan pelatihan berbasis redensial. Pelatihan berbasis keluarga merupakan program diluar panti atau bantuan dengan jenis kemandirian. Biasanya bantuan ini bisa berupa modal usaha. Sedangkan pelatihan yang berbasis redensial merupakan program pelatihan berupa keterampilan yang didapat melalui sebuah Panti, yang bertempat di Panti Budi Luhur.

Pelatihan berbasis redensial tersebut dilaksanakan selama enam bulan, sehingga untuk menjamin kesehatan mereka selama disana, maka mereka dibuatkan BPJS dan asuransi kesehatan. Agar dapat dipastikan bahwa perlindungan terhadap kesehatannya memang benar-benar diperhatikan.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, jika ditinjau dari segi peran Dinas Sosial Kota Banjarbaru terhadap pelaksanaan Perda Nomor 1 Tahun 2020 tentang perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, maka Dinas Sosial Kota Banjarbaru itu sendiri sudah menjalankan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan SKPD tersebut. Adapun perlindungan dan pemenuhan hak yang dilakukan juga sudah terpenuhi sebagaimana yang terdapat di Peraturan Daerah tersebut.

2. Upaya Dinas Sosial Kota Banjarbaru Mengatasi Pengemis Tuna Netra di Kecamatan Banjarbaru Utara

Permasalahan pengemis sudah sering terjadi, apalagi di kota-kota besar. Mengenai adanya para pengemis ini, tentunya menjadi masalah yang harus diatasi dan merupakan tanggung jawab dari berbagai pihak. Maraknya fenomena pengemis menunjukkan bahwa sulitnya untuk memberantas para pengemis, karena faktor utama yang menyebabkan munculnya pengemis yaitu kemiskinan. Dalam menyikapi fenomena pengemis tersebut, diperlukan beberapa usaha atau upaya guna mengatasi permasalahan sosial ini.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap pegawai Dinas Sosial Kota Banjarbaru yang menjabat sebagai Penyuluh Sosial

Ahli Muda Sub. Koordinator Seksi Rehabilitasi Lanjut Usia dan Disabilitas, beliau menerangkan bahwa ada beberapa upaya yang dilakukan oleh Dinas Sosial itu sendiri dalam mengatasi permasalahan pengemis tuna netra yang berada di Jalan Nadjmi Adhani, Kecamatan Banjarbaru Utara. Adapun upaya-upaya yang dilakukan adalah sebagai berikut:

a. Upaya Pencegahan (Preventif)

Pencegahan merupakan serangkaian upaya yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, dan berbagai pihak terkait, demi mencegah berkembang atau meluasnya jumlah penyebaran serta permasalahan yang menjadi penyebab munculnya pengemis. Adapun upaya pencegahan yang dilakukan seperti sosialisasi. Sosialisasi yang dilakukan disini berupa upaya pencegahan terhadap pengemis. Bagi para anggota PERTUNI, baik itu yang menetap di rumah disabilitas atau yang memilih menetap diluar, mereka pastinya sudah mendapatkan arahan terlebih dahulu agar tidak mengemis lagi dijalanan.

Namun, berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap pengemis tuna netra di Jalan Nadjmi Adhani, rata-rata mereka termasuk dari keanggotaan PERTUNI & YTKN yang merangkap menjadi dua organisasi sekaligus.

b. Upaya Penanggulangan (Represif)

Penanggulangan merupakan upaya untuk mengurangi atau membebaskan tempat-tempat umum dari kemunculan pengemis. Adapun upaya penanggulangan

yang biasa dilakukan adalah dengan cara penertiban pengemis atau razia. Biasanya razia melibatkan pihak-pihak lain yang turut andil ikut didalamnya, seperti Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Satpol PP, Dinas Perhubungan, serta pihak-pihak lain yang memungkinkan untuk diperlukan. Pastinya dalam hal razia ini diperlukan kerjasama dan tanggung jawab yang baik dari berbagai pihak tersebut.

Upaya razia pengemis yang biasa dilakukan ada dua macam. Pertama, razia resmi. Razia resmi adalah razia yang memerlukan surat izin serta bantuan dari berbagai pihak yang terlibat didalamnya. Kedua, sidak. Sidak adalah razia dengan cara langsung turun ke tempat kejadian perkara atau tanpa adanya surat pemberitahuan. Biasanya dengan cara yang kedua ini atau sidak, lebih banyak pengemis yang terjaring razia. Sedangkan kalau secara resmi itu, beritanya banyak yang bocor kepada para pengemis.

Sehingga saat di razia, para pengemis tersebut seolah-olah hilang, hanya sekitar satu atau dua orang saja yang tersisa. Mengenai razia resmi ini pun masih menjadi tanda tanya, siapa yang telah membocorkan informasi razia. Sedangkan jika di pikir-pikir tidak mungkin tersebar kalau bukan dari pihak terkait yang tahu informasi tersebut. Selain itu, dengan adanya bantuan hp android yang pernah diberikan kepada para tuna netra tersebut, ternyata disalahgunakan untuk saling memberi tahu jika akan diadakannya razia. Hal tersebut yang membuat upaya penanggulangan pengemis dengan cara razia belum dilaksanakan secara maksimal.

Tindak lanjut dari razia yaitu dengan penangkapan pengemis di lokasi. Para pengemis yang terjaring razia tersebut diamankan di tempat penampungan sementara milik Dinas Sosial. Hal tersebut guna dilakukannya pendataan atau identifikasi, serta diberikan pembinaan secara sosial dan mental. Setelah pembinaan, para pengemis tersebut dipulangkan dengan sebuah perjanjian. Akan tetapi, dengan cara tersebut tidak menimbulkan efek jera dari mereka. Bahkan sampai saat ini pun, kegiatan mengemis masih saja tetap dilakukan. Hal itu dikarenakan kurang tegasnya sanksi yang diberikan. Sehingga para pengemis beranggapan bahwa selesai di razia, pasti akan dipulangkan. Begitu pun seterusnya.

c. Upaya Rehabilitasi (Rehabilitatif)

Rehabilitasi sosial adalah proses refungsionalisasi tata kehidupan bermasyarakat dan peningkatan taraf kesejahteraan sosial terhadap pengemis, yang dilakukan dengan sistem panti atau luar panti. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, beberapa pengemis tuna netra mengaku memiliki keahlian pijat, dan keahlian tersebut sebelumnya didapatkan melalui sebuah program pelatihan yang terdiri dari 2 macam, yaitu pelatihan dengan berbasis keluarga dan pelatihan berbasis redensial. Pelatihan berbasis keluarga merupakan program diluar panti atau bantuan dengan jenis kemandirian. Biasanya bantuan ini bisa berupa modal usaha. Sedangkan pelatihan yang berbasis redensial merupakan program pelatihan berupa keterampilan yang didapat melalui sebuah Panti, yang bertempat di Panti Budi Luhur.

Jika melihat dari upaya rehabilitasinya, maka lebih mengarah ke program diluar panti. Hal itu dikarenakan rata-rata dari pengemis tuna netra sebelumnya sudah mempunyai keahlian pijat yang didapatkan saat mereka pelatihan didalam Panti. Bahkan sampai saat ini pun mereka masih melayani pasien pijat. Namun, dikarenakan sepi pelanggan atau kurangnya penghasilan, mereka memutuskan untuk mencari penghasilan tambahan lewat cara mengemis. Hal itu menunjukkan bahwa program pelatihan panti sudah diterapkan. Bahkan sebelum mereka mengemis pun program tersebut sudah dikerjakan.

Akan tetapi, untuk upaya rehabilitasi yang dilakukan yaitu berupa bantuan modal usaha, dan penawaran mengenai menyanyi di cafe-cafe atau berjualan pulsa saja dirumah. Namun, upaya tersebut masih belum berjalan secara maksimal dan sesuai harapan. Hal tersebut dikarenakan kurangnya rasa sabar dari para pengemis dalam mencari rezeki, sehingga mereka memilih cara yang instant saja yaitu dengan mengemis. Apalagi jika bertepatan dengan hari Jum'at, sudah pastinya banyak sekali dermawan yang membagikan rezeki kepada mereka.

d. Upaya Persuasif

Upaya persuasif merupakan upaya yang dilakukan dengan cara lemah lembut, membimbing atau mengajak individu untuk memenuhi atau berperilaku sesuai dengan kaidah-kaidah dalam masyarakat, bukan dengan cara kekerasan. Adapun upaya persuasif yang dilakukan yaitu pada saat pengemis di razia dan dibawa ke kantor Dinas Sosial, biasanya mereka mendapatkan pembinaan secara sosial dan mental. Namun, upaya ini juga belum berjalan secara maksimal. Selain

itu, dari pihak Dinas Sosial juga memberikan saran agar mahasiswa khususnya dari UIN Antasari Banjarmasin, bisa melakukan penyuluhan keagamaan terhadap para pengemis tuna netra tersebut, guna melembutkan hati mereka agar berhenti mengemis.